J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Irenius Alviano [1], Citra Ayudiyati [2]
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta
torinviano@gmail.com[1], caudiati@gmail.com[2]

Article History:
Received: 28 November 2024
Revised: 14 Desember 2024
Accepted: 17 Desember 2024

Keywords: *Sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

Abstract: *Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewah Yogyakarta Tahun 2023? b. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023? c. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif melalui sistem pengendalian internal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023? d. Apakah transparansi berpengaruh positif melalui sistem pengendalian internal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023? e. Apakah akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023?*

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal dan Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal.

Kata kunci: Sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN (Times New Roman, size 12)

Reformasi ekonomi pemerintahan tahun 2001 meningkatkan tuntutan dari publik terhadap pemerintah untuk menjadi pemerintah yang bersih dan otoriter. Paradigma baru ini memaksa entitas termasuk pemerintah untuk bertanggungjawab secara transparan berupa laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas (Jauhari et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan berkarakteristik

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, maka pengguna dapat memperoleh informasi yang berguna dari laporan keuangan (Imelia et al., 2021). Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya, karena keempat karakteristik itu merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah kualitas laporan keuangan yang akuntabel, transparansi kepada masayarakat. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Indonesia juga telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undanganan. Otonomi daerah yang luas dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai good government governance. Dengan adanya otonomi daerah maka terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan dibuktikan dengan lahirnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Berdasarkan paparan diatas, hal ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah, yakni diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing sehingga muncul adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi melaui sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dicek oleh auditor baik itu oleh BPK RI maupun audit antara provinsi maupun kabupaten sebagai auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia (Septiana dkk, 2013). Sehingga kualitas laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik. Didalam kualitas laporan keuangan adanya akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor pertama mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Yaya & Wahyuli, 2019).

akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggunngjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas

yang diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan instansi yang bersangkutan.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan 13 akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat." Jadi dapat dikatakan kepercayaan masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah. Terbukamya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan akan meciptakan percaya nya masyarakat kepada pemerintah dan keterbukaan tersebut akan menciptaakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003:13).

Sistem pengendalian internal adalah suatu kegiatan dan aktivitas yang terintegrasi yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh karyawan secara berkesinambungan untuk menjamin terwujudnya tujuan suatu organisasi. PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan atas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan (Sujana et al., 2020). Penelitian Murniati (2021) dan Agustiningtyas et al (2020) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian Philadhelphia et al (2020) dan Imelia et al (2021) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian Sujana et al (2020) yang berjudul Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel independen yang digunakan, yang mana penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pengendalian internal berdasarkan penelitian Yaya & Wahyuli (2019).

Berdasarkan uraian diatas dengan berbagai permasalahan yang ada, penulis memandang bahwa perlu adanya penelitian ilmiah yang mengkaji tentang "Pengaruh akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023". Harapan peneliti adalah hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai wacana untuk menumbuhkan inisiatif bagi lembaga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sehingga meningkatan kualitas laporan keuangan secara maksimal.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah dijadikan acuan agar terwujudnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah bagian keuangan sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selain itu juga terdapat keterkaitan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya sistem pengendalian internal diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang terbaik guna mengurangi adanya penyimpangan (Philadhelphia et al., 2020).

Akuntabilitas

Selain akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan guna meningkatkan pengamatan. Transparansi merupakan cara pemerintahan menunjukkan kepada publik pekerjaan yang telah dilakukan secara bersih dan jujur, termasuk informasi tentang strategi, formulasi dan implementasinya, dan hasil yang dicapai (Yaya & Wahyuli, 2019). Transparansi menuntut terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk memberikan dan menyampaikan informasi (Rahayu & Dewi, 2022).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu kegiatan dan aktivitas yang terintegrasi yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh karyawan secara berkesinambungan untuk menjamin terwujudnya tujuan suatu organisasi (Sujana et al., 2020). Sistem pengendalian internal merupakan aktivitas pengendalian manajemen sistem informasi guna untuk membuktikan keakuratan dan lengkapnya informasi (Murniati, 2021).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi terkait keuangan pemerintahan dalam satu periode keuangan guna menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi (Sujana et al., 2020). Laporan keuangan berfungsi sebagai alat yang ditunjukkan kepada pemegang saham sebagai bentuk bukti fisik dalam hal keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berjalan (Pratiwi et al., 2022). 12 Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan kelebihan anggaran, dan catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait dengan APBN (Oktarina et al., 2016). Laporan tersebut ditujukan kepada pembuat keputusan di luar pemerintahan guna memberikan informasi perihal kondisi keuangan yang berasal dari pemerintah dan hasil dari operasi pemerintahan tersebut. LKPD akan ditelaah oleh BPK kemudian diberikan kepada DPR/DPRD dan publik setelah diaudit (Jatmiko, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penulis Pratiwi et al (2022) dengan judul penelitian pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan variabel independen transparansi, akuntabilitas ,partisipasi masyarakat dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dengan hasil penelitian menujukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Adapun persamaan variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan variabel dependen adalah Kualitas laporan keuangan serta uji instrumennya yaitu uji Validitas dan uji reliabilitas serta adapun perbedaanya yaitu variabel independen partisipasi masyarakat, teknik analisi data struktural equation modeling (SEM), partial least square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3 dan uji hipotesis uji T pada PLS.

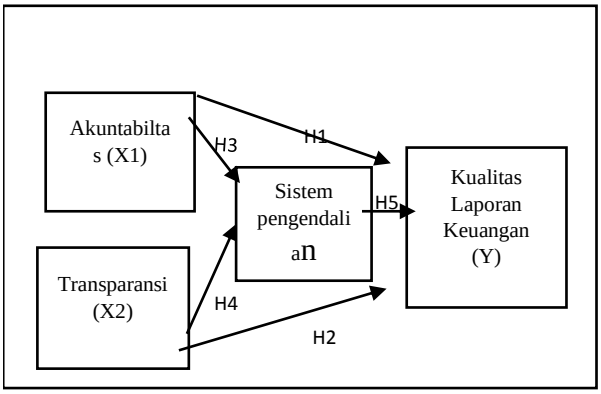
Penulis Philadhelp hia et al (2020) dengan judul penelitian pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good governance, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. dengan variabel dependen kualitas laporan keuangan variabel independen kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good governance, dan sistem pengendalian internal. hasil penelitian menemukan bahwa standar akuntansi pemerintahan, dan good governance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen kualitas laporan keuangan

dan jenis penelitian kuantitatif serta uji instrumennya yaitu uji Validitas dan uji reliabilitas dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good governance, dan sistem pengendalian internal teknis aanalisi data Analisis Regresi Berganda, struktural equation modeling (SEM), partial least square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3 dan uji hipotesis uji T pada PLS.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan dasar teori dan studi sebelumnya yang telah diuraikan di atas. Kerangka berfikir difungsikan agar membantu dalam menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Perumusan Hipotesis

Perumusan Hipotesis adalah menjelaskan hubungan antar variables independen dan variabels dependen yang bersumber pada materi-materi yanggada, sehinggah akan memberikann gambarann untuk pengaruhh antara variabell tersebut.

1. H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023?
2. H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023?
3. H3: Akuntabilitas berpengaruh posistif melalui sistem pengendalian internal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023?
4. H4: Transparansi berpengaruh posistif melalui sistem pengendalian internal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023?
5. H5. Akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 orang Pegawai Badan Keuangan dan Aset Derah (BKDA) di daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023/2024.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei dengan alat pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner. Angket adalah suatu salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode

survei (Hadi, 2015). Adapun jenis metode angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keempat variabel penelitian yaitu akuntabilitas (X1), transparansi melalui sistem pengndalian internal (X2) dan kualitas laporan keuangan (Y) adalah kuesioner. Kuesioner ditujukkan untuk seluruh pegawai di istimewa Yogyakarta. Kuesioner penelitian mencakup 5 pernyataan setiap variabel. Dengan demikian jumlah item pernyataan disampaikan kepada responden penelitian sebanyak 20 item pernyataan. Keseluruhan jawaban responden diberi nilai sesuai dengan rentang nilai tersebut dan kemudian dirangkum dalam satu tabulasi data untuk membuat unit analisis dengan cara rata-rata jawaban responden mengenai persepsi pegawai tentang akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Pilot Study Penelitian ini menggunakan pilot study untuk menguji kelayakan kuesioner, apakah kuesioner sudah dapat dipahami oleh responden atau justru sebaliknya responden tidak memahami pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Pilot study dilakukan pada 25 responden pada pemerintah daerah istimewah Yogyakarta. Pilot study dilakukan pada 25 responden, hasil review dari 25 responden menyatakan responden mengalami kesulitan untuk memahami item pertanyaan pada variabel baik itu variabel akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pengendalian internal. Berdasarkan evaluasi dari 25 responden pada pilot study pertama, ada beberapa perubahan kuesioner terutama pada item pertanyaan bagian variabel akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pengendalian internal. Setelah ada perubahan pertanyaan yang merasa sulit dipahami oleh responden.

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. Pendekatan untuk menganalisis second order factor adalah menggunakan repeated indicators approach atau juga dikenal dengan hierarchical component model.

Model Pengukuran atau Outer Model

Uji validatas

Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui Uji validitas convergent validity, average variance extracted (AVE), dan discriminant validity.

a. Content Validity

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hasil studi literatur dengan modifikasi seperlunya untuk menghindari kecenderungan responden terhadap preferensi tertentu.

b. Convergent Validity

Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5. (Ghozali, 2012).

c. Average Variance Extrated (AVE)

Uji validitas ini adalah dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai average variance extracted (AVE).

d. Discriminant Validity

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskiriminan dapat dilihat pada nilai cross loading, apabila nilai cross loading setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainya (Ghozali, 2012).

suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability $\geq 0,7$ (Sekaran, 2014). Model Struktural atau Inner Model Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori

substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive elevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling (SEM) dengan smartPLS. Dalam full model structural equation modeling selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dengan melihat nilai peritungan Path Coefisien pada pengujian inner model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistic dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) Nilai koefisien (β5) variabel Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah bertanda negatif yaitu -0,032 dengan nilai signifikansi sebesar 0,731 dan lebih besar dari 0,05 (0,731 > 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 0,344 dan lebih kecil dibanding 1.96 (0,334 < 1.96). Hal ini menunjukan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Berdasarkan Hipotesis tersebut ditolak hal ini terjadi karena tidak semua aparat pemerintah daerah bekerja sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan bidangnya sehingga akuntabilitas yang baik dapat menyebabkan kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mahardini & Miranti, 2018) dan (Septarini & Papilaya, 2016) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Berdasarkan standar pada akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan diharapkan dapat dibandingkan (Liu, 2020). Apabila pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan programnya dengan baik maka laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Pratiwi et al., 2022);

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa Nilai koefisien (β5) variabel Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah bertanda positif yaitu 0,094 dengan nilai signifikansi sebesar 0,390 dan lebih besar dari 0,05 (0,7395 > 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 0,861 dan lebih kecil dibanding 1.96 (0,861 < 1.96). Hal ini menunjukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

2. Pengaruh akuntabilitas Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis data menunjukan bahwa variabel Akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien (β5) bertanda positif yaitu 0,285 dan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 2,654 dan lebih besar dibandingkan 1.96 (2.654<1.96). Hal ini menunjukan bahwa Akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

3. Pengaruh transparansi melalui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan

keuangan

Hasil analisis data menunjukan bahwa variabel Transparansi melalui Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien (β5) bertanda positif yaitu 0,322 dan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 3,091 dan lebih besar dibandingkan 1.96 (3.091<1.96). Hal ini menunjukan bahwa Transparansi melalui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima.

4. Pengaruh Akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis statistic dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) Nilai koefisien (β5) variabel Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah bertanda negatif yaitu -0,032 dengan nilai signifikansi sebesar 0,731 dan lebih besar dari 0,05 (0,731 > 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 0,344 dan lebih kecil dibanding 1.96 (0,334 < 1.96). Hal ini menunjukan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. Pada variabel transparansi menujukan bahwa Nilai koefisien (β5) variabel Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah bertanda positif yaitu 0,094 dengan nilai signifikansi sebesar 0,390 dan lebih besar dari 0,05 (0,7395 > 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 0,861 dan lebih kecil dibanding 1.96 (0,861 < 1.96). Hal ini menunjukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. Pada variabel Akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien (β5) bertanda positif yaitu 0,285 dan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 2,654 dan lebih besar dibandingkan 1.96 (2.654<1.96). Hal ini menunjukan bahwa Akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. Pada variabel Transparansi melalui Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien (β5) bertanda positif yaitu 0,322 dan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan nilai T statistik sebesar 3,091 dan lebih besar dibandingkan 1.96 (3.091<1.96). Hal ini menunjukan bahwa Transparansi melalui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima.

Berdasarkan dari masing- masing hipotesis diatas menunjukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga Pemerintahan yang baik secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang ditandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan, terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak (BPK), serta memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari masing- masing hipotesis diatas menunjukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga Pemerintahan yang baik secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang ditandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan, terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak (BPK), serta memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan.

DAFTAR REFERENSI

Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(3), 149– 163

Jauhari, H., Sari, Y., & Dewata, E. (2019). Implementation of good governance, utilization of information technology and reliability of government financial statement. Journal of Accounting and Strategic Finance, 2(2), 117–126.

Murniati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting,

Philadhelphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 2(1), 17–35.

Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 11(05).

Septiana, I., et al. (2013). Penentu Jumlah Temuan BPK atasSistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan (Internal Control Compliance Comments) Pemerintah Daerah di Indonesia. Seminar Nasional Akuntansi XVI. Manado.

Sujana, E., Kurniawan Saputra, K. A., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(9)

Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(9), 98–

Yaya, R., & Wahyuli, H. (2019). Determinants of Financial Statements Quality in Village Government. 102(Icaf), 134–138. https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.22